

## BAB II

### KONTROVERSI KETERLIBATAN AUSTRALIA

#### DALAM PERANG DI IRAK TAHUN 2003

Invasi Irak, tahun 2003, dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi dimulai oleh Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 2003. Adapun tujuan-tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk "melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak".<sup>15</sup> Sebagai persiapan, pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 100.000 tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait.<sup>16</sup>

Australia ikut bergabung dengan tentara koalisi pimpinan AS, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, memulai serangan udara di sejumlah sasaran di seluruh Irak.<sup>17</sup> Tanggal 20 Maret 2003 (19 Maret menurut waktu Amerika Serikat) merupakan hari pertama Operasi Pembebasan Irak, yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Ba'athist di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Hampir semua angka yang berkaitan dengan perang sering diperdebatkan, dan dalam perang Irak jumlah korban jiwa penduduk sipil Irak adalah yang paling sering menjadi perdebatan.

<sup>15</sup><http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030322.html> (online)

<sup>16</sup><http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/18/sprj.irq.deployment/index.html> (online)

Dalam bab ini akan disampaikan secara jelas bagaimana keterlibatan Australia dalam invasi ke Irak serta pro dan kontra keterlibatan Australia tersebut.

#### **A. Keterlibatan Australia dalam Perang Irak**

Seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu Australia dapat kita katakan sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling setia setelah Inggris. Australia secara tegas mendukung kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, terutama dalam hal / bidang pertahanan dan militer, terhitung sejak Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, dan yang terbaru perang di Afghanistan dan Irak. Sehingga, bagi Australia, keikutsertaan negaranya dalam perang Irak tahun 2003 lalu bukanlah perang Australia bersama Amerika Serikat yang pertama kali.

Sebagai realisasi dari dukungan pemerintah Australia terhadap kebijakan Amerika Serikat menginvasi Irak, ribuan personel militer Australia dikirim dan ikut bergabung dalam pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Irak.<sup>18</sup>

Dalam sebuah bukti tertulis bahwa di Irak terdapat 122mm amunisi kosong yang ditemukan di Ukhaider, area pembuangan amunisi pada 16 Januari 2003. Sebelas di antaranya dilaporkan dalam keadaan yang sempurna.

---

<sup>18</sup> "As Iraq war looms: Australian government shuts down parliament for two weeks", dari

Sedangkan dua belas lainnya menarik perhatian lebih besar dibandingkan yang lainnya dan kemudian diserahkan kepada para ahli untuk dipelajari. Namun, tidak ditemukan adanya bahan-bahan kimia maupun biologi di sekitar tempat ditemukannya amunisi-amunisi tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa amunisi-amunisi tersebut diimpor oleh Irak pada akhir tahun 1980-an. Amunisi-amunisi tersebut tidak disebutkan oleh Irak pada deklarasi tentang pemusnahan senjata pemusnah massal pada tahun 1997 dan Desember 2002. Barang-barang tersebut akan dilarang melalui resolusi PBB dan segala macam zat kimia yang digunakan untuk melengkapi amunisi-amunisi tersebut juga akan dilarang. Para penyelidik tersebut juga menemukan *bunker* yang tidak terpakai. Salah satu dari bunker tersebut dipercaya dibangun pada akhir tahun 1990-an. Bunker-bunker tersebut kemudian dipelajari lebih lanjut oleh para ahli yang bekerja untuk PBB. Australia menduga Irak masih terus mengembangkan senjata-senjata, pemusnah massalnya.<sup>19</sup>

Australia berpendapat bahwa kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut oleh Irak sangat berbahaya bagi keamanan dan perdamaian dunia, mengingat negara tersebut dipimpin oleh Saddam Hussein. Dan bagi Australia mengurangi penyebaran senjata pemusnah massal merupakan tindakan yang benar, sesuai dengan hukum, dan juga merupakan salah satu

---

<sup>19</sup> Konferensi Pres yang diadakan oleh Minister for Defence, Senator Robert Hill, di Commonwealth Parliamentary Offices, Adelaide. Dalam <http://www.australianpolitics.com/news/2003/03-01-17.shtml> (online)

dari kepentingan Australia<sup>20</sup>, oleh karenanya salah satu tujuan pengiriman pasukan ke Irak adalah untuk mengakhiri pengembangan senjata pemusnah masal, dan menghancurkan yang masih tersisa.

Alasan lain Australia mendukung invasi AS ke Irak, yaitu Australia punya kepentingan untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan sipil di Irak.<sup>21</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut Australia, rakyat Irak tidak pernah merasakan demokrasi, terutama setelah Irak dikuasai oleh pemimpin yang diktator dan otoriter yaitu Saddam Hussein semenjak tahun 1979. Di samping itu menyebarkan demokrasi telah menjadi agenda internasional, yang dielu-elukan terus oleh Amerika Serikat, semenjak berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Australia dan Amerika Serikat akan mempromosikan demokrasi di Irak, hingga Irak dianggap mampu melakukan sendiri dengan benar.

*"We believe the time has come to disarm Iraq, by force if necessary. We are participating in the US-led coalition to achieve this objective."*<sup>22</sup>

Adapun pernyataan Perdana Menteri John Howard tersebut secara jelas menunjukkan dukungannya atas serangan Amerika Serikat terhadap Irak dan memperlihatkan komitmennya terhadap hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat. Keputusan pemerintah Australia itu mendapat kritikan dari masyarakat internasional dan reaksi protes keras dari masyarakat

<sup>20</sup>Transkrip Pidato John Howard menyusul keputusan Amerika Serikat untuk memimpin perang ke Irak, di televisi nasional. Dalam <http://www.australianpolitics.com/news/2003/03-03-20/.shtml>

<sup>21</sup>Hamilton, Clive, *The Left and the Iraq War*(2005), dalam <http://fpif.org/fpifxt/154>

domestiknya sendiri, namun Perdana Menteri John Howard tetap pada komitmennya untuk melaksanakan doktrin *pre-emptive* dan mengirim pasukannya ke Irak. Memang, sejak pertama kali Presiden Bush mengatakan niatnya untuk melakukan invasi ke Irak, PM John Howard adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Padahal Tony Blair selaku Perdana Menteri Inggris pada waktu itu meminta tenggang waktu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum akhirnya ia menyatakan mendukung rencana AS untuk melakukan serangan ke Irak tersebut.

Setelah itu, telah tercapailah kesepakatan antara Australia dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan pembelian unit-unit komando dan perlengkapan militer baru dalam rangka persiapan operasi militer tersebut. Dan pada pertengahan bulan Januari 2003, Australia tentunya di bawah pemerintahan PM John Howard mengirimkan 2000 tentara dari unit-unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke Teluk tanpa referensi dari parlemen.<sup>23</sup>

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Presiden Bush menelepon Perdana Menteri John Howard yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tidak akan menunggu keputusan Resolusi PBB untuk menyerang Irak. Malam harinya, PM John Howard melakukan rapat dengan kabinet Australia. Keesokan harinya, Presiden Bush menelepon kembali untuk mengkonfirmasi bahwa invasi terhadap Irak akan dilancarkan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, rapat dengan kabinet Australia kembali

---

<sup>23</sup>“*Australian cabinet rubberstamps military commitment to Iraq War*” dari

dilakukan oleh PM John Howard, dan dalam rapat tersebut “disetujui” komitmen militer Australia dalam perang tersebut. Pemerintah Australia menggunakan suara mayoritas di Majelis Rendah untuk meloloskan resolusi yang mendukung perang ke Irak. Senat, yang tidak memiliki suara mayoritas, menolak keputusan itu, mengajukan protes dan menyalahkan pemerintah Australia, serta meminta penarikan kembali pasukan militer Australia. Namun demikian, protes itu tetap tidak mempengaruhi keputusan yang telah diambil oleh PM John Howard.

Adapun salah satu komentar tentang kebijakan PM John Howard yang dimuat dalam Australian Financial Review menyatakan bahwa :

*“The deeper he has become enmeshed in George W. Bush’s international adventurism, the less issue has been open for any real debate anywhere.”*<sup>24</sup>

Begitulah gambaran singkat saat proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang memutuskan untuk ikut serta / terlibat dalam invasi ke Irak. Dari situ terlihat jelas bahwa PM John Howard memandang aliansi Australia dengan Amerika Serikat begitu penting, oleh karena itu Australia di bawah pemerintahannya bersedia menuruti dan mendukung penuh Amerika Serikat, karena sesuai dengan kepentingan Australia meskipun mungkin tidak bersangkutan secara langsung.

---

<sup>24</sup>“Australian cabinet rubberstamps military commitment to Iraq War” dari

## **B. Pro dan Kontra Keterlibatan Australia dalam Perang Irak**

Sesungguhnya kontroversi adalah suatu hal yang lumrah atau wajar terjadi. Di mana pun, dalam setiap kebijakan yang diambil tentu selalu ada pro dan kontranya. Ada pihak yang setuju dan ada juga pihak yang tidak setuju. Ada yang mendukung dan ada yang menentang. Namun, persoalan yang menarik untuk diamati dan diteliti (dalam hal ini kebijakan luar negeri suatu negara) tentulah yang sifatnya kontroversial, terutama yang lebih dominan kontra-nya. Yaitu, mengapa kebijakan tersebut tetap dijalankan meskipun mendapat protes dan tentangan dari banyak pihak.

Politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi atau mencapai kepentingan nasionalnya, kepentingan nasional ini dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan rencana-rencana yang dituju oleh suatu negara.<sup>25</sup>

Pengiriman pasukan Australia ke Irak ini pun menjadi bahan perdebatan, karena protes tidak hanya datang dari luar negeri, akan tetapi juga terjadi di dalam negeri Australia sendiri, mulai di antara kalangan masyarakat biasa hingga orang-orang yang berada di dalam gedung parlemen. Suara mereka terbagi antara menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan tersebut. Terlepas dari perdebatan-perdebatan tersebut, pemerintah Australia tetap saja mengirimkan pasukannya sebanyak sekitar 2.000 personil angkatan

bersenjata Australia (Australian Defence Force / ADF), tentara-tentara Australia tersebut dikirim untuk membantu tentara Amerika Serikat berperang di Irak. Walaupun terjadi banyak protes di dalam negerinya sendiri, namun tentara Australia masih banyak yang bertahan di Irak, jumlahnya diperkirakan berjumlah sekitar 1.300 personil. Dengan demikian berarti Australia menjadi negara terbesar ketiga yang mengirim pasukan ke Irak setelah Amerika Serikat dan Inggris.

Perdana Menteri Howard tetap meyakini pentingnya aliansi Australia dengan AS, khususnya dalam perang melawan terorisme. Dalam Joint Meeting dengan Kongres AS pada Juni 2002, PM John Howard menegaskan:

*"We have taken our place beside you in the war against terrorism, knowing beyond all doubt that it was an attack upon ourselves and our way of life as surely as it was upon your own. America has no better friend anywhere in the world than Australia"*<sup>26</sup>

Tampaknya dibalik pernyataan / argumen tersebut dapat terlihat bahwa Australia ingin dianggap sebagai warga internasional yang baik, Australia ingin mempererat koalisi / aliansi dan hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Australia ingin memberikan kontribusi besar yang tercermin dalam pengambilan keputusan pengiriman pasukan tersebut. PM John Howard juga menegaskan bahwa dukungan Australia terhadap Amerika Serikat dalam invasi ke Irak adalah sekaligus merupakan kepentingan



nasional Australia. Kebijakan PM John Howard tersebutlah yang kemudian memunculkan kritik di begitu banyak kalangan masyarakat Australia.

Ketidakpuasan masyarakat Australia atas kebijakan pemerintahnya mengenai invasi ke Irak juga didukung oleh para mantan elit Australia. Pada September 2002 mantan Gubernur Jenderal Bill Hayden, mantan Perdana Menteri (seperti Gough Whitlam, Malcolm Fraser, dan Hawke), mantan elit militer seperti Jenderal Peter Gration (mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia), Laksamana Alan Beaurmont, dan Admiral Michael Hudson, mantan pemimpin Partai Liberal John Hewson dan Kepala RSL Mayor Jenderal Peter Philips muncul di depan publik dan menyeru kepada PM John Howard untuk menolak upaya penyerangan Amerika Serikat ke Irak.<sup>27</sup>

Kemudian di lain kesempatan, ada sekitar 100 orang berkumpul di luar gedung Konsulat Amerika di Melbourne pada tanggal 19 Januari 2003 siang, sebagai bentuk unjuk solidaritas bagi hari protes internasional menentang perang melawan Irak. Menurut Damien Lawson dari Jaringan Perdamaian Victoria, lebih dari 90 persen warga Australia menentang dilakukannya serangan pimpinan Amerika terhadap Irak, dan unjuk rasa itu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Perdana Menteri Australia John Howard dan menunjukkan dukungan bagi gerakan dunia menentang perang di Irak. Perdana Menteri Australia mengatakan, ancaman

---

<sup>27</sup>Patrick Walters, "Wait for UN, warn elder statesmen", *The Australian* (26 September 2002),

diambilnya tindakan militer terhadap Irak merupakan bagian dari respons diplomatik terhadap masalah Irak.<sup>28</sup>

Unjuk rasa menentang rencana penyerangan Amerika Serikat ke Irak terus berlangsung. Di Sydney, Australia, pada hari Jumat 21 Februari 2003, Menteri Urusan Perempuan Australia Sandra Nori ikut bergabung dengan 2.000 orang yang menolak rencana tersebut. Aksi serupa juga digelar sejumlah pelajar di Canberra. Mereka memukul-mukul mobil Perdana Menteri John Howard yang tengah melaju memasuki Gedung Parlemen. Pelajar mengecam sikap PM Howard yang mendukung rencana Negeri Paman Sam.<sup>29</sup>

Ribuan pelajar berteriak, meniup peluit, dan bernyanyi, ketika mereka kemarin menggelar demonstrasi antiperang di berbagai tempat di negara tersebut. Mereka mencap PM John Howard sebagai "penghasut perang yang akan menghancurkan masa depan mereka dengan bom", karena PM itu mendukung mati-matian rencana serangan AS ke Irak. Dalam aksi protes bertema "Buku, Bukan Bom" itu, para pelajar sekolah lanjutan tingkat atas tersebut membuat lalu lintas macet total di sebuah distrik pusat bisnis kota Sydney. Dalam suasana yang lebih mirip konser musik pop, mereka berlari dan melompat-lompat di *boulevard* George Street, berteriak, dan menyanyikan slogan-slogan antiperang.

---

<sup>28</sup> <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2003-01-20/unjuk-rasa-di-australia-menentang-perang-lawan-irak/814362>

Aksi protes para pelajar Australia juga terjadi di 13 kota lain, termasuk Melbourne. Di sana, para aktivis serikat buruh ikut mengadakan aksi unjuk rasa. Sementara di Adelaide, para pelajar berdemonstrasi di luar gedung parlemen negara bagian. Semua aksi demonstrasi itu berlangsung damai, kata polisi.

Kemudian, seperti yang telah diungkapkan di bagian awal skripsi ini (Bab I), bahwa berbagai kota besar di Australia, Sabtu 15 Februari 2003, kembali dilanda unjuk rasa besar-besaran guna memprotes kebijakan Pemerintah Federal Australia mengirim pasukan ke Timur Tengah sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana AS menyerang Irak.<sup>30</sup> Tidak kurang dari 5.000 orang hari Sabtu tersebut melakukan unjuk rasa di pusat kota Canberra, ibukota Australia, sebagai protes terhadap keterlibatan Australia dalam rencana perang terhadap Irak. Unjuk rasa yang diperkirakan terbesar yang pernah terjadi di Canberra itu dilakukan secara damai, dan diwarnai dengan orasi dari sejumlah pembicara seperti politisi dari Partai Buruh Australia serta tokoh agama Katolik setempat. Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan pernyataan anti-perang yang menentang kebijakan Pemerintah Australia dalam kaitan dengan pengiriman pasukan ke Timur Tengah. Salah satu spanduk itu berbunyi, "Australia Jangan ikut Koalisi Pembunuhan".

Di Perth, unjuk rasa diperkirakan melibatkan sedikitnya 10 ribu warga Australia, begitu juga di Hobart dan Melbourne serta Sydney. Pemimpin

Partai Hijau, Bob Brown mengatakan di Hobart bahwa rakyat Australia menentang perang terhadap Irak karena perang itu dilakukan demi minyak bukan kemanusiaan. Para pengunjung rasa meminta Perdana Menteri Australia John Howard menarik kembali pasukan Australia yang telah dikirim ke kawasan Timur Tengah dan tim pemeriksa senjata PBB diberikan waktu agar masalah Irak dapat diselesaikan secara damai.

Banyak pihak yang tidak setuju mengenai pengiriman pasukan tersebut, salah satunya adalah karena kebijakan Australia yang terkesan selalu menuruti kehendak Amerika Serikat. Bahkan ketika melihat argumen yang diajukan Australia sebagai pembenaran perang Irak hampir tidak terdapat perbedaan dengan pembenaran yang digunakan oleh Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat yang besar terhadap penentuan kebijakan ini tercermin dalam pernyataan tersebut. Bahkan secara tidak langsung Howard mengakui hal tersebut dengan mengatakan partisipasi Australia dalam perang Irak merupakan salah satu tugas Australia sebagai anggota aliansi Amerika Serikat.

Jika ditotal, selama bulan Februari 2003, lebih dari 200.000 orang melakukan unjuk rasa di Sydney, menentang perang di Irak. Sehingga itu merupakan aksi protes terbesar di Australia sejak Perang Vietnam. Jajak pendapat menunjukkan, mayoritas warga Australia menentang perang

menjadi tameng hidup, berharap dapat mencegah perang dengan memasang badan mereka di antara masyarakat Irak.<sup>31</sup>

Dalam acara di sebuah stasiun radio pada 2 Oktober 2002, yang memperdebatkan dukungan Australia atas kebijakan AS terhadap Irak, Perdana Menteri John Howard berusaha untuk meyakinkan publik Australia yaitu bahwa Australia mempunyai hutang sejarah kepada AS. Menurut PM John Howard, tidak ada satu negara pun kecuali Australia, yang senantiasa berperang bersama Amerika Serikat, sejak Perang Dunia II sampai Perang Irak. PM John Howard mengatakan:

*“America was crucial to this country in World War II, without the US this country could well have been attacked. Any cursory look at Australian history will tell you that.”*<sup>32</sup>

Dilihat dari berbagai fakta tersebut, jelas terlihat sekali bahwa Australia ingin selalu dekat dengan Amerika Serikat, entah itu karena merasa memiliki hutang sejarah, politik deposit, atau yang lainnya. Australia terlihat ingin selalu menjadi teman baik Amerika Serikat. Perdana menteri Australia John Howard tetap membela keputusannya mengirim pasukan ke Irak bersama pasukan koalisi AS, sebagai komitmen negaranya. Ia mengakui biaya yang dikeluarkan negaranya untuk perang di Irak sangat-sangat besar, tapi Howard yakin kontribusi Australia dalam invasi ke Irak akan "sangat

<sup>31</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/06/nas4.htm> (online)

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ray Hadley, Radio 2GB, 2 Oktober 2002, dalam Gurry "Issues in Australian Foreign Policy....." hlm.231

dihargai" dan telah memperkuat aliansi negara Australia dengan AS. Perdana Menteri John Howard sangat percaya invasi ke Irak adalah hal yang benar. Padahal faktanya dari hasil survei-survei yang dilakukan, kebanyakan warga Australia menentang keterlibatan negara mereka dalam perang AS di Irak.

Pada masyarakat Australia, rencana serangan ke Irak sangat kontroversial. Rencana serangan itu bahkan telah membelah opini publik Australia, seperti yang sebelumnya telah terjadi menjelang serangan AS ke Afganistan. Berdasarkan *The Courier Mail* tanggal 18 September 2002, kontroversi dan keterbelahan opini publik itu antara lain bisa dilihat lewat jajak pendapat Morgan Poll yang menunjukkan 54 persen publik Australia tidak menyetujui rencana serangan itu, 40 persen menyatakan setuju, dan enam persen belum menetapkan sikap.<sup>33</sup>

Implikasi keterbelahan opini publik itu dengan sendirinya membawa efek cukup signifikan dalam konteks persaingan politik domestik Australia. Partai Hijau, partai yang paling tegas dan konsisten menyatakan menolak serangan AS ke Irak, mencatat lonjakan dukungan cukup berarti dari empat persen menjadi delapan persen. Partai Buruh, yang sebelum debat parlemen masih ragu-ragu menetapkan sikap, melorot dari 41 persen menjadi 36 persen, sementara Partai Demokrat yang tengah dilanda kemelut internal tetap dalam posisi empat persen berdasarkan *Newspoll*.

Namun ada orang yang sangat setuju dengan PM John Howard, yaitu mantan menteri luar negeri Australia Alexander Downer. Dia termasuk mantan pejabat Australia yang mendukung invasi ke Irak.<sup>34</sup> Menurutnya, jika Australia tidak ikut mengirimkan pasukannya, maka Australia hanya akan menjadi pemain kecil dalam event-event global. Dalam perjalanannya, para penasehat senior pemerintahan Negeri Kanguru itu akhirnya mengingatkan pemerintahan Howard bahwa invasi ke Irak hanya menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang, antara lain memicu ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah, mendorong munculnya kelompok-kelompok ekstrimis di Irak dan merusak citra negara AS maupun Australia serta makin meningkatnya sentimen anti-Barat.

Kemudian, dalam sebuah konferensi pers, Rabu 22 Januari 2003, di Sydney, Menteri Pertahanan Australia Robert Hill mengatakan, negaranya akan segera mengirimkan pasukan ke Timur Tengah.<sup>35</sup> Dukungan tersebut diwujudkan dengan menyiagakan pasukan yang terdiri dari pasukan elite, angkatan udara, dan tim khusus alat peledak. Mereka yang tergabung dalam Operasi Bastille ini akan diangkut dengan kapal perang HMAS Kanimbla dalam waktu dekat.

---

<sup>34</sup><http://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/pasukan-tempur-australia-pulang-as-makin-ditinggalkan-sekutunya-di-irak.htm#.Ug0EVaB-8YA> (online)

<sup>35</sup>[http://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/pasukan-tempur-australia-pulang-as-makin-ditinggalkan-sekutunya-di-irak.htm#.Ug0EVaB-8YA](#) (online)